

Similarity result of_Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan

by Anna Yulianita

Submission date: 15-May-2023 05:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093626659

File name: 8819-20780-5-PB.pdf (733.69K)

Word count: 4405

Character count: 29491

Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan

Nadya Ayu Delima¹, Taufiq Marwa² dan Anna Yulianita^{2*}

¹ Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

* Email penulis korespondensi: annayulianita@yahoo.co.id

Abstract: The analysis in this study aims to determine the effect of regional financial performance which includes regional independence ratios, effectiveness ratios, and efficiency to capital ratios for public services in the South Sumatra Province. The data used in this study are secondary data from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the realization of the Regional Budget in 2007-2015. The analysis technique used in this study is panel data regression. The results of the study show that: (1) the independence ratio does not have a significant effect on capital expenditure for public services (2) significant effectiveness ratios affect capital expenditure for public services (3) efficiency ratio significantly influences capital expenditure for public services. In conclusion, the three ratios used by South Sumatra have higher intercepts than other provinces. This indicates that South Sumatra has the highest capital expenditure for the highest public services in Sumbagsel.

Keywords: Financial performance, regional budget, independence ratio, effectiveness, efficiency and capital expenditures

JEL Classification: O10, H5

1. PENDAHULUAN

Upaya pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya otonomi daerah adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi).

Sejalan dengan perubahan undang-undang otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Public services*). Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Puspitasari, 2013).

Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah bersangkutan. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat diberikan suatu pernyataan keberhasilan pemerintah daerah dan dapat diidentifikasi perbaikan jika memang diperlukan.

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (1998) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam kegiatan pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Assyurriani, 2015).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki data APBD yang paling tinggi sehingga Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan penerimaan pendapatan daerah yang paling tinggi dari empat provinsi lainnya. Dan juga Provinsi Sumatera Selatan memiliki data pengeluaran belanja daerah yang paling tinggi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan proyek-proyek pembangunan daerah dari empat Provinsi SeSumatera Bagian Selatan. Belanja modal terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal dan peralatan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan bangunan serta belanja modal fisik lainnya (Assyurriani, 2015). Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Pulau Sumatera.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2001). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan.

2.1.1. Pengeluaran Rutin

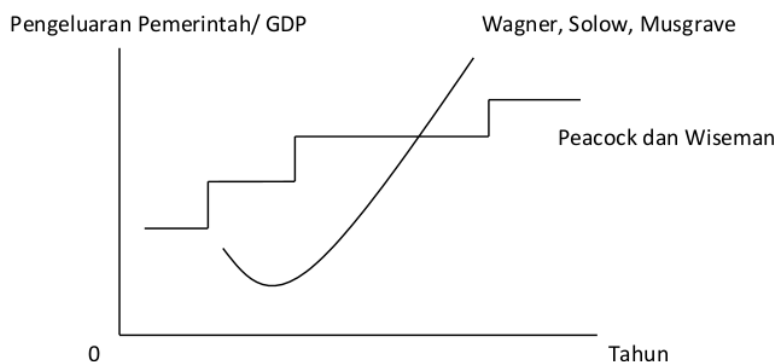
Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintah, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

2.1.2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan dan irigasi, jembatan sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang

publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesebroto, 2001).

Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan pada tahap awal pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi agar lepas landas. Teori Peacock dan Wiseman adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesebroto, 2001).



Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Sumber: Mangkoesebroto, 2011 dalam Ekonomi Publik

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah (Adisasmita, 2011). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

2.3. Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 21 tahun 2011). Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan

berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja Modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berbentuk dari unsur Laporan Peratanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002):

- (1) Memperbaiki kinerja pemerintah.
- (2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- (3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2008). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktifitas (Halim, 2008). Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktifitas (Pratiwi, 2014).

2.5. Penelitian Terdahulu

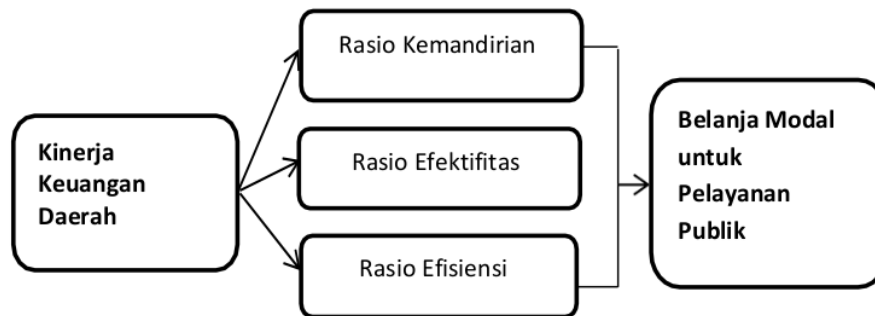
Tiara (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) dalam penelitiannya menemukan terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Se-Indonesia. Kemudian studi yang dilakukan oleh Susetyo (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima provinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda Kolmogorof Smirnov dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Provinsi Se-Sumatera bagian Selatan.

Soedarsa dan Putri (2014) dalam penelitiannya menemukan ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah Kota Se-Provinsi Lampung kemerdekaan 2011 dan 2012, didasarkan pada efektivitas indikator, efisiensi dan pertumbuhan keuangan daerah. Selain itu, studi yang telah dilakukan oleh Susanti dan Saftiana (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja keuangan di Provinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi (63,81%) dan Provinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah (49,22%). Hasil analisis lokal kemampuan keuangan dan keuangan efektivitas Pemda ini keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi (50,11%) untuk kemampuan. Ini (132,17%) untuk efektivitas keuangan daerah. Berikutnya aktivitas hasil analisis keuangan daerah menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki tertinggi pelayanan publik rasio skor (40,52%). Sementara itu hasil Smirnov menunjukkan bahwa itu sig asymp skor 0.859. Itu berarti tidak ada perbedaan signifikan dari kinerja keuangan pemerintah daerah di lima provinsi di Regional Sumatera Selatan.

Hafidh (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa semua daerah masih mempunyai tingkat kemandirian daerah (KD) yang sangat rendah. Tingkat efisiensi daerah (EFD) menunjukkan nilai yang kurang baik. Variabel efektivitas daerah menunjukkan rasio yang cukup efektif karena semua daerah mampu melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiga rasio keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, akan tetapi R² hanya sebesar 0,38. Artinya kinerja keuangan yang diproksi dari PAD tidak dapat mempengaruhi Belanja Modal Publik. Belanja Modal mempengaruhi PDRB secara positif dan signifikan. Jadi, model kinerja daerah yang dinyatakan dalam rasio keuangan daerah tersebut hanya mampu menerangkan perubahan pada variabel PDRB sebesar 35%.

2.6. Alur Pikir Penelitian

Pengaruh analisis kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal SeSumatera Bagian Selatan dianalisa dengan menggunakan 2 variabel yaitu kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan belanja modal untuk pelayanan publik. Analisis akan dilakukan dengan berbagai metodologi penelitian sehingga nantinya akan diketahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik SeSumatera Bagian Selatan. Alokasi belanja modal merupakan salah satu yang ditunjukkan untuk kepentingan perekonomian daerah dan digunakan salah satunya untuk aktifitas pemerintahan itu sendiri dan kegiatan pembangunan fasilitas umum dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka secara skematis kerangka konseptual (kerangka berpikir) penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pikir Penelitian

3. METODE

Penelitian ini dilakukan pada lima provinsi Sesumatera Bagian Selatan, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Data yang digunakan adalah data panel selama 9 tahun yaitu dari tahun 2007-2015 meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini akan membahas Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik SeSumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Diperoleh dari situs (website) resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik SeSumatera Bagian Selatan. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dengan model regresi linier yang disajikan pada persamaan sebagai berikut:

$$BMPP = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 EKM + \beta_3 EFKM + e_i$$

dimana: BMPP adalah belanja modal jenis pelayanan publik; α adalah konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi; KM adalah kemandirian daerah EKM adalah efektifitas keuangan daerah; EFKM adalah efisiensi keuangan daerah; dan e adalah variabel pengganggu.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD (Halim, 2007) antara lain:

- (1) Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan dengan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2008).
- (2) Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian semakin besar rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun semakin baik (Halim, 2008).
- (3) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 % (Halim, 2007: 234).

Tabel 1. Kriteria Rasio Keuangan Daerah

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan Daerah
0-25%	Rendah Sekali
>25-50%	Rendah
>50-75%	Sedang
>75-100%	Tinggi

Sumber: Mahsun, 2006 dalam Batafor 2011

Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Persentase Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kemampuan Keuangan Daerah
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2011:171)

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5%-10%	Efisiensi
11%-20%	Cukup Efisien
21%-30%	Kurang Efisien
>30%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2011)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode estimasi, yaitu estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pemilihan metode disesuaikan dengan data yang tersedia dan reliabilitas antara

variabel. Sebelum melakukan analisis regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat digunakan. Setelah model dipilih, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis penelitian.

Ikhtisar pemilihan model akhir digunakan untuk menentukan model regresi yang akan digunakan. Penentuan model terbaik antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* menggunakan dua teknik estimasi model. Dua Teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Dua uji yang digunakan, pertama *Chow Test* dan yang kedua *Hausman Test*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah panel data. Pada regresi data panel terdapat tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, maka perlu dilakukan beberapa uji untuk memilih model mana yang terbaik untuk memprediksi model regresi dari penelitian yang dilakukan. Beberapa uji yang dilakukan untuk mendapatkan model terbaik dalam analisis regresi data panel yaitu Uji Chow, dan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 2. Hasil Regresi Menggunakan Metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*

Variable	Common		Fixed		Random	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	14.04877	0.0000	14.89037	0.0000	14.80865	0.0000
RKM	0.009359	0.2463	-0.017345	0.0531	-0.015156	0.1314
REKM	-0.006639	0.0001	-0.003958	0.0008	-0.004114	0.0010
REFKM	-0.008784	0.0652	-0.008520	0.0032	-0.008460	0.0065

Sumber: Data diolah penulis, 2016

Metode yang digunakan adalah model *Fixed Effect* karena untuk memperpanjang observasi dan untuk melihat perbedaan belanja modal pelayanan publik antara provinsi yang ada di Provinsi SeSumatera Bagian Selatan. Hasil estimasi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect* di atas dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$BMPP = 14,89037 - 0,017345*(RKM) - 0,003958*(REKM) - 0,0085200*(REFKM)$$

4.1. Pembahasan

Kemandirian keuangan di Provinsi SeSumatera Bagian Selatan masih rendah. Dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung menduduki tingkat kemandirian peringkat pertama dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 49.23% yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Lampung memberikan kontribusi yang paling besar bagi total pendapatan daerahnya. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung menduduki tingkat terakhir dari lima Provinsi, dengan rata-rata sebesar 30.58%. Hal ini dikarenakan Provinsi Bangka Belitung adalah provinsi baru, pajak dan retribusi Provinsi Bangka Belitung pun masih sangat rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Belitung sangat rendah. Persentasenya lebih besar dari 25-50%, dengan demikian rasio kemandirian Provinsi SeSumatera Bagian Selatan tergolong dalam kategori kemandirian rendah dengan pola hubungan yang konsultatif. Hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, setiap daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dari kelima Provinsi yang ada di Provinsi SeSumatera Bagian Selatan pada tabel diatas termasuk dalam klasifikasi tidak efektif yaitu diperingkat pertama terjadi di Provinsi Bengkulu dengan rata-rata sebesar 63.92% sedangkan efektifitas terendah terjadi di Provinsi Jambi dengan rata-rata 44.29%. karena dalam merealisasikan pencapaian Pendapatan Asli Daerah tidak melebihi dari target penerimaan.

Rasio efisiensi keuangan pemerintah Provinsi SeSumatera Bagian Selatan tahun 2007-2015 diketahui tidak ada yang efisien. Provinsi yang menduduki peringkat pertama adalah Provinsi

Bangka Belitung dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 120.75%. Sedangkan di peringkat terakhir adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata sebesar 101.01% dengan kriteria tidak efisien. Dari hasil perhitungan di bawah ini tidak ada Provinsi yang termasuk dalam kriteria yang sangat efisien. Berarti pada lima Provinsi Sumatera Bagian Selatan masih belum efisien dalam mengelola keuangan daerahnya hal ini dapat dilihat dalam periode penelitian tidak ada satupun data yang menunjukkan angka kurang dari 1 atau dibawah 100%, artinya penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Semua daerah mempunyai APBD yang defisit, karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Berdasarkan persamaan hasil regresi di atas dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Rasio kemandirian (RK) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio kemandirian yaitu sebesar -0,017345. Artinya setiap kenaikan rasio kemandirian sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar 0,017345%. Rasio efektifitas (RE) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio efektifitas yaitu sebesar -0,003958. Artinya setiap kenaikan rasio efektifitas sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar 0,003958%. Rasio efisiensi (RF) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio kemandirian yaitu sebesar -0,008520. Artinya setiap kenaikan rasio efisiensi sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar 0,008520%. Nilai rata-rata dari komponen kesalahan random (*random error component*) sebesar 14.89037.

Nilai intersep dari masing-masing provinsi di SeSumatera Bagian Selatan bertanda negatif, namun besar nilai intersepnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan keragaman faktor di masing-masing Provinsi. Di Provinsi SeSumatera Bagian Selatan, rata-rata nilai belanja modal Sumatera Selatan dengan Provinsi lainnya berbeda. Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang paling tinggi dengan nilai rata-rata belanja modal untuk pelayanan publik sebesar 15.60. Dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan lebih unggul dibidang kesehatan dan pendidikan dan juga dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi yang masih dikembangkan serta Provinsi Sumsel yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Provinsi Jambi berada di peringkat kedua dengan rata-rata belanja modal sebesar 15.06. Provinsi.

Rasio kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, hal ini dikarenakan rasio kemandirian Provinsi SeSumatera Bagian Selatan masih tergolong dalam kategori kemandirian rendah, yang dimana masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam bantuan dana untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak dan redistribusi pada masing-masing Provinsi Sumatera Bagian Selatan masih rendah sehingga sumber pendapatan untuk masing-masing Provinsi masih rendah. Hal ini sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa rasio kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2009) yang menyatakan alasan rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal dikarenakan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten masih bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian yang relatif kecil bila dilihat dari hasil statistik tidak mampu mengubah komposisi belanja dalam APBD kota dan kabupaten di Jawa Tengah, sehingga timbul suatu pergeseran paradigma komposisi belanja dari belanja modal ke belanja pemeliharaan.

Berdasarkan hasil estimasi bahwa rasio efektifitas berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Karena rasio efektifitas pada lima Provinsi SeSumatera Bagian Selatan dalam merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar efektifitas atau pencapaian target, maka alokasi belanja modal untuk pelayanan publik juga semakin besar. Rasio efektifitas atau pencapaian target Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kinerja keuangan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, jika pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun lalu melampaui target maka target untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan

minimal sebesar pencapaian tahun lalu. Penetapan besaran target Pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya tentu berimplikasi pada proyeksi belanja di tahun yang sama. Maka pemerintah daerah dapat menentukan target yang layak untuk dicapai pada tahun berikutnya, sehingga belanja juga dapat diproyeksikan. Idealnya, jika target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun berikutnya naik, maka kenaikan ini juga berimbas pada alokasi belanja di tahun yang sama.

Berdasarkan hasil estimasi bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Artinya semakin efisien daerah maka kemampuan belanja modal menjadi lebih besar. Rasio Efisiensi pada lima provinsi SeSumatera Bagian Selatan menunjukkan angka yang baik karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima. Karena semakin kecil rasio biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin efisien. Hal ini sesuai dengan penelitian Vegasari (2010) bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya. Hal ini juga memunculkan pertanyaan, daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan dapat mempengaruhi jumlah belanja modal, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja.

5. KESIMPULAN

Bagi pemerintah daerah Provinsi SeSumatera Bagian Selatan diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara lebih intensif dan aktif. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD, memperbaiki kinerja BUMD dan mencari sumber- sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat. Tanpa peningkatan kinerja keuangan, pemerintah daerah akan. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih relevan, subjek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya dan penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu mengalami kesulitan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal untuk pelayanan publik.

REFERENSI

- Assyurriani, Raja. (2015). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013. *Jurnal Ekonomi*, Hal. 2-3.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Diakses pada tanggal 15 Maret 2016 melalui: www.djpk.depkeu.go.id
- Dwijayanti, Retno dan Ruserlistyanti. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12. No. 01.
- Hafidh, Aula Ahmad. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18, No. 2, Oktober 2013: 109-120. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kaho, Yosef Riwu. (1998). *Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mangkosoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Musgrave R.A and Musgrave P.B. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Susetyo, Didik. (2008). Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 6 No.1. Hal. 39 – 53.

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

Tiara, Ferani Ingrid. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Brawijaya, Malang.

Similarity result of_Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	uad.portalgaruda.org Internet Source	2%
2	pdffox.com Internet Source	2%
3	sipora.polije.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%